BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1 Profil Tempat Kerja Praktek

PT.INTI (Persero) Bandung adalah salah satu perusahaan BUMN dengan status perseroan yang dibawahi oleh departemen keuangan sebagai pemilik saham.

Sejarah Instansi

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia resmi berdiri melalui peraturan pemerintah No.34 Tahun 1974. Sejak tanggal 28 Desember 1974 dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.34 Kep.171/MK/IV/12/1974 merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status perseroan yang dibawahi oleh departemen keuangan sebagai pemilik saham. Dengan demikian PT.INTI (persero) setiap tahunnya diaudit oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP). Selain itu PT.INTI (persero) memiliki auditor internal dibawah Satuan Pengawas Intern (SPI).

Berdasarkan PP No.59 Tahun 1989,PT.INTI dimasukan kedalam kelompok BPIS (Badan Pengelola Industri Strategis) bersama sembilan perusahaan lainnya,yaitu: PT.PINDAD, PT.PAL Indonesia, PT.DAHANA, PT.KRAKATAU STEEL, PT.IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara), PT.LEN (Lembaga Elektronika Nasional), PT.BOMA BISMA INDRA, PT.BARATA, PT.INKA (Industri Kereta Api

Tahap-tahap perkembangan PT.INTI

- **Sebelum tahun 1945**

  Tahun 1926 didirikan Laboratorium PTT (Pos,Telepon,Telegram) di Tegalega (sekarang JL.Moch.Toha No.77).Kemudian pada tahun 1929, Laboratorium ini menjadi bagian penting bagi penelitian dan pengembangan pertelekomunikasian di indonesia.

- **Tahun 1945-1960**

  Setelah perang dunia ke-2 selesai, Laboratorium tersebut ditingkatkan kedudukannya menjadi labolatorium telekomunikasi yang mencakup seluruh bidang telepon,telegrap dan radio.Sedangkan bengkel pusat diubah menjadi pusat telekomunikasi.

- **Tahun 1960-1968**

  Perkembangan PT.INTI dimulai sejak terjalin kerjasama antara perusahaan negara telekomunikasi dengan Siemen AG pada tanggal 26 mei 1966 dan pelaksanaannya dibebankan pada Lembaga Penelitian danPengembangan POS dan Telekomunikasi (LPP POSTEL). Dengan adanya unsur industri pada lembaga ini, maka selanjutnya LPP POSTEL diubah menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri pos dan telekomunikasi (LPPI POSTEL). Pada tanggal 22 juni 1968, industri telekomunikasi yang berpangkal pada bagian telepon diresmikan oleh Presiden RI yang diwakilkan pada menteri Ekuin yang pada waktu itu dijabat oleh Sultan Hamengkubuwono IX.

- **Tahu 1968-1974**

Pada tanggal 1-3 Oktober 1970, diadakan rapat kerja pos dan telekomunikasi di Jakarta. Selanjutnyan, berdasarkan surat keputusan Menteri perhubungan RI nomor : KM.32/R/PHB/1973 ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam tubuh LPP POSTEL, diresmikan bagian Industri Telekomunikasi oleh Presiden RI pada tanggal 22 juni 1968 di bandung.
2. Untuk keperluan industri diatas, ditetapkan bentuk hukum sebaik-baiknya sehingga cakup kualiatas di LPPI POSTEL telah diubah menjadi LPP POSTEL.
3. Sehubungan dengan itu, dianggap tepat apabila proyek tersebut ditetapkan. Sebagai proyek industri yang dipimpin oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi.

Kemudian dengan PP RI nomor 34 tahun 1974, proyek industri pada Departemen Perhubungan dijadikan sebagai suatu badan pelaksana kegiatan produksi alat-alat dan perangkat telekomunikasi dalam memenuhi sarana dan prasarana telekomunikasi.

Agar pelaksanaan kegiatan produksi tersebut dapat berjalan dan berkembang secara wajar berdasarkan kemampuan sendiri, maka dipandang perlu untuk menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan sifat bidangnya, yaiyu perusahaan PERSEROAN.Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI no.Kep.1711/MK/IV/12/1974 akta notaris Abdul Latief, Jakarta no.332, proyek

industri telekomunikasi diubah menjadi PT.INTI (persero) sejak tanggal 30 Desember 1974

- **Tahun 1974-1979**

  Tahap ini merupakan percobaan menuju industri dengan tingkat perkembangan yang masih belum stabil. Hasil produksi yang penting adalah pesawat radio HF/SBB dan alat penunjang kelancaran pemilu berupa Sambungan Telepon Kendaraan Bermotor (STKB).

- **Tahun 1980-1990**

  Periode ini merupakan periode pemantapan struktur menuju lepas landas pelita IV. Perkembangan terutama didukung oleh keputusan pemerintah dengan sasaran program dan ditetapkan sistem telekomunikasi nasional sehingga melahirkan pabrik telekomunikasi digital pertama di indonesia.

- **Tahun 1991- sekarang**

  Masih merupakan rencana dimana PT.INTI (persero) bersama dengan industri dalam negri lainnya, harus mampu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri. Hal ini karena usaha pencapaian teknologi merupakan dasar bagi pencapaian sasaran tersebut.

  Perkembangan yang telah dicapai dengan didukung oleh proyeksi arah teknologi yang akan datang serta dengan peningkatan kualitas karyawan merupakan faktor yang mempercepat laju pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, dalam keppres no.59, pemerintah menetapkan PT.INTI(persero) sebagai salah satu dari 9 jajaran strategis di indonesia.

3.1.2 Logo Instansi



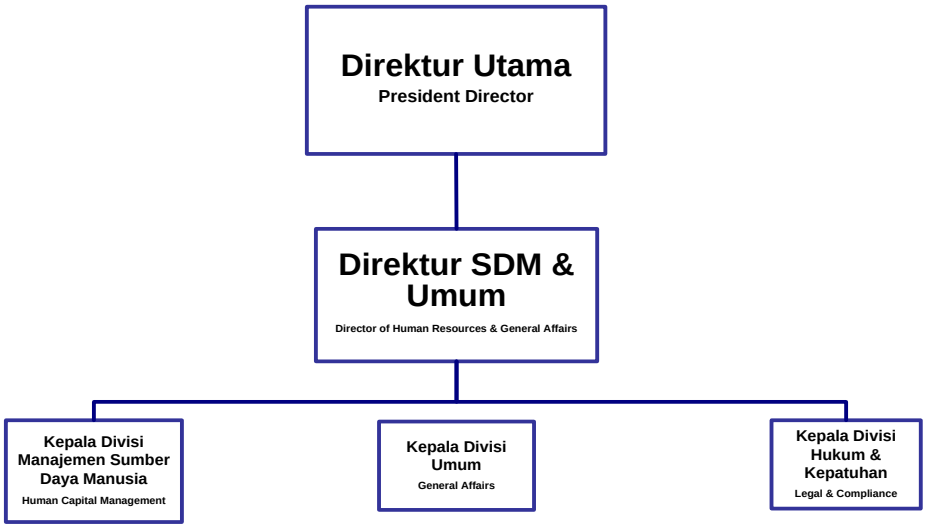
Gambar 3-1: Logo PT.INTI (Persero) Bandung

3.1.3 Badan Hukum Instansi

Dengan berdasarkan pada keputusan Mentri Negara Republik Indonesia No.Kep.1771/MK/IV/12/1974 tertanggal 28 Desember 1974, Akte Notaris Abdul Latif, Jakarta No.322 tertanggal 30 Desember 1974, proyek industri telekomunikasi ini diubah status hukumnya menjadi PT. Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT. INTI (Persero).

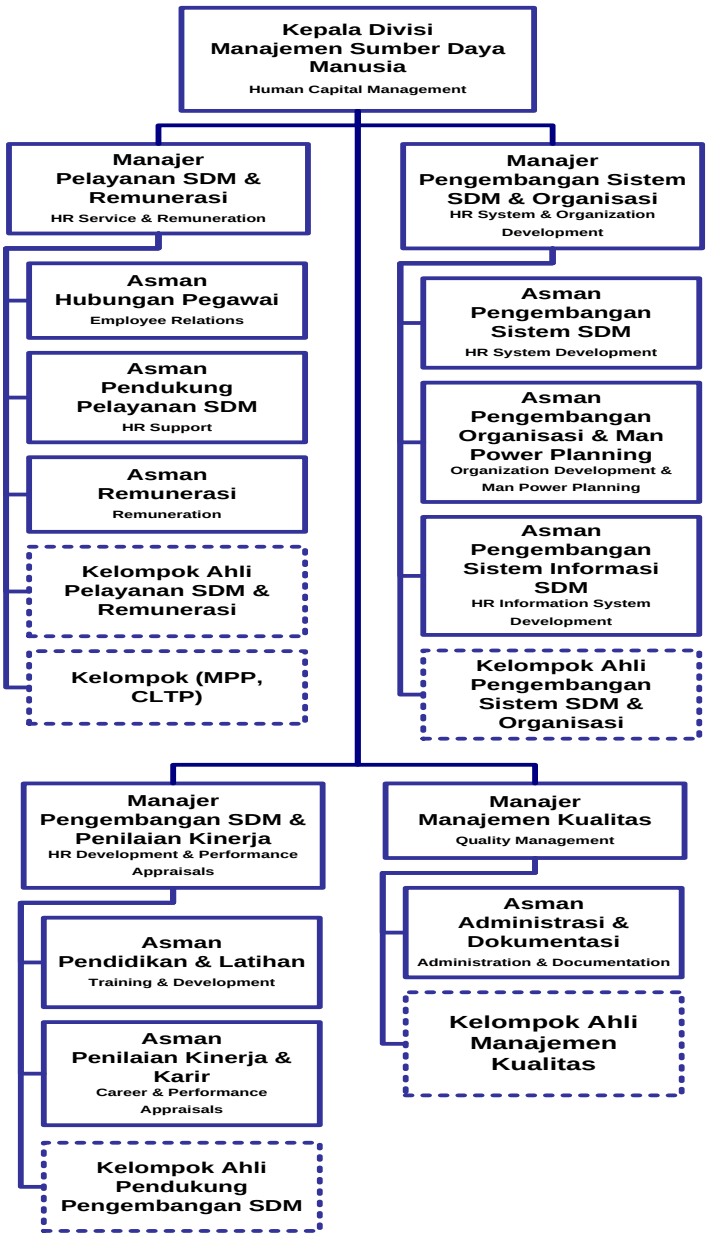
3.1.4 Struktur Organisasi dan Job Description

Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan divisi yang berada dibawah Direktorat SDM & Umum brasama-sama dengan beberapa divisi lainnya. Lebih jelasnya sebagai berikut.



Gambar 2-2 : Struktur Organisasi PT.INTI (Persero) Bandung.

Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia sendiri terdiri atas empat bagian kerja dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 2-3 : Struktur Organisasi Bagian Sumber Daya Manusia

Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang membawahkan empat bagian kerja. Tiap bagian dipimpin oleh Seorang Manager Bagian.

Kepala Divisi

1. Memimimpin,mengatur,membina dan mengendalikan Pelaksanaan tugas pada di Divisi MSDM.
2. Menetapkan Kebijakan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah
3. Menetapkan program kerja dan rencana Strategis dan penegembangan pada Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
4. Menyelanggarakan Fasilitas yang berkaitan dengan Penyelenggaraan program

Asman Adm Sumber Daya Manusia

1. Merencanakan,mengarahkan dan melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang SDM meliputi : pengadaan Inventaris,Kepegawaian,gaji,Administrasi Surat Menyurat,dan pengarsipan dokumen serta hal-hal lainya yang berkaitan dengan Administrasi Pengelolaan SDM dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku di perusahaan.

2. Melaporkan kemajuaan kegiataan dalam bidang Administrasi serta memberikan ekomendasi alternative penyelesaian masalah kepada Atasan.
3. Menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan,program kerja,anggaran Biaya dan investasai unitnya.
4. Membina dan mengembangkan Kompetensi SDM dan Unitnya.
5. Melaksanakan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh tasan.

Pelaksana Madya Sumber Daya Manusia

1. Melaksanakan kegiatan bidang umum yang meliputi pengadaan barang

inventaris,Administrasi surat menyurat dan pengarsipan dokumen serta hal-hal lainya yang berkaitan dengan administrasi umum serta administrasi pengelolaan SDM dengan berdasarkan pada ketentuan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan.

2. Melaporkan kemajuaan pelaksanaan tugasnya serta memberikan rekomendasi penyelesaiaan masalah Administrasi umum kepada atasan.

3.Membantu menyusun dan mengusulkan rencana kegiataan,program kerja,anggaran dan investasi unitnya.

4. Melaksanakan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh atasan.